

Analisis Transparansi Laporan Keuangan Pemerintahan Pusat dan Daerah Tahun 2024 & 2025

Anisa Dinda Pertiwi¹ Clarita Joyce Sitanggang² Putri Uli Sitompul³ Putri Kemala Sari
Dewi Lubis⁴ Khairani Alawiyah Matondang⁵

Program Studi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan, Kota Medan,
Provinsi Sumatera Utara, Indonesia^{1,2,3,4,5}

Email: anisadindapertiwi@gmail.com¹ claritajoycesitanggang@gmail.com²
putriulisitompul0@gmail.com³ putrikemala@unimed.ac.id⁴ alawiyah@unimed.ac.id⁵

Abstract

This research aims to analyze transparency in Central & Regional Government Financial Reports, which is in line with Law Number 14 of 2008 concerning openness of public information which emphasizes the public's right to obtain information. This research uses a descriptive method with a qualitative approach. The data sources used in this research are previous journals, books and other supporting documents. Data collection techniques in this research were carried out through literature studies. Results - recent. The research results show that although transparency is supported by strong regulations, its implementation still faces obstacles such as limited access to information, suboptimal quality of disclosure, use of technical terms that are difficult to understand, and reporting delays. Apart from that, factors such as limited human resources, information systems that have not been integrated, and lack of commitment are also obstacles. Therefore, it is necessary to improve the quality of presentation of financial reports, ease access to information, and strengthen systems and supervision so that transparency can be realized effectively and increase public trust.

Keywords: Transparency of Central and Regional Government Financial Reports

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Transparansi pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat & Daerah yang mana hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik yang menekankan hak masyarakat untuk memperoleh informasi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa jurnal- jurnal terdahulu, buku, serta dokumen-dokumen pendukung lainnya. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi literature (literature study). hasil – belakangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun transparansi telah didukung oleh regulasi yang kuat, implementasinya masih menghadapi kendala seperti keterbatasan akses informasi, kualitas pengungkapan yang belum optimal, penggunaan istilah teknis yang sulit dipahami, serta keterlambatan pelaporan. Selain itu, faktor seperti keterbatasan sumber daya manusia, sistem informasi yang belum terintegrasi, dan kurangnya komitmen juga menjadi hambatan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas penyajian laporan keuangan, kemudahan akses informasi, serta penguatan sistem dan pengawasan agar transparansi dapat terwujud secara efektif dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Kata Kunci: Transparansi Laporan Keuangan Pemerintahan Pusat dan Daerah



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Transparansi merupakan hal penting yang selalu mendapat perhatian public dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini disebabkan oleh penyerahan kewenangan, tanggung jawab, dan sumber daya keuangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengelola pendapatan serta belanja daerah secara mandiri dibahas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (

UU HKPD). Hal ini menyebabkan perubahan signifikan dalam komposisi pengeluaran anggaran pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Akibat hal tersebut pemerintah harus dapat meningkatkan Transaparansi dalam Laporan keuangan pemrintahan pusat dan aderah. Salah satu syarat untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan melakukan reformasi dalam penyajian laporan keuangan dimana pemerintah harus mampu menyediakan semua informasi keuangan relevan secara jujur dan terbuka kepada publik dalam rangka melaksanakan amanat rakyat. Laporan keuangan pemerintah merupakan sarana utama dalam menyampaikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, serta arus kas pemerintah dalam suatu periode tertentu. Melalui laporan keuangan, masyarakat dapat menilai sejauh mana pemerintah telah mengelola sumber daya secara efektif, efisien, dan akuntabel. Oleh karena itu, transparansi dalam penyajian laporan keuangan menjadi aspek penting untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Namun, dalam praktiknya, tingkat transparansi laporan keuangan pemerintah masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa permasalahan yang sering ditemukan antara lain keterbatasan akses informasi, kurangnya kelengkapan pengungkapan dalam Catatan atas Laporan Keuangan, serta penyajian informasi yang belum sepenuhnya mudah dipahami oleh masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa transparansi belum sepenuhnya optimal.

Selain itu, transparansi juga berkaitan erat dengan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Kedua regulasi tersebut menekankan pentingnya penyajian laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan serta mendukung pengawasan oleh masyarakat dan lembaga terkait. Syahrída (2009) menegaskan: "Dari sekian banyak permasalahan yang ada pada pemerintahan daerah, salah satunya adalah akuntansi". Salah satu permasalahan penting yang menyebabkan hal tersebut adalah kurangnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan pemerintah sebagai salah satu unsur tata kelola pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai praktik pengelolaan keuangan pemerintah, serta untuk mengetahui bagaimana transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan tersebut.

Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi yang dapat membantu instansi pemerintah dalam meningkatkan praktik pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel. Fenomena yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah masih kurangnya Transparansi pemerintah dalam Laporan keuangan. Hal ini menunjukkan lemahnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis transparansi dalam laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah, serta mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam mewujudkan transparansi tersebut. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan pemerintah yang lebih transparan dan akuntabel.

Kajian Pustaka

Pengertian Transparansi

Transparansi merupakan prinsip keterbukaan dalam penyampaian informasi kepada publik, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya dan pengambilan keputusan. Dalam konteks sektor publik, transparansi berarti pemerintah memberikan akses yang luas kepada masyarakat terhadap informasi keuangan, sehingga masyarakat dapat mengetahui dan mengawasi penggunaan anggaran negara. Transparansi menjadi salah satu

unsur penting dalam meningkatkan kepercayaan publik serta mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan.

Konsep Good Governance

Good governance merupakan konsep tata kelola pemerintahan yang menekankan pada penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Transparansi menjadi salah satu pilar utama dalam good governance karena memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan terhadap kebijakan dan pengelolaan keuangan negara. Selain transparansi, prinsip lain dalam good governance meliputi akuntabilitas, partisipasi, supremasi hukum, serta efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan pemerintahan.

Laporan Keuangan Pemerintah

Laporan keuangan pemerintah merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan negara dalam suatu periode tertentu. Laporan ini menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus kas pemerintah. Secara umum, laporan keuangan pemerintah terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, serta Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan ini berfungsi sebagai alat untuk menilai kinerja pemerintah dalam mengelola keuangan publik, sekaligus sebagai sarana untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat.

Indikator Transparansi

Transparansi dalam laporan keuangan pemerintah dapat diukur melalui beberapa indikator, antara lain Aksesibilitas informasi, yaitu kemudahan masyarakat dalam memperoleh laporan keuangan. Kelengkapan informasi, yaitu penyajian seluruh komponen laporan keuangan secara utuh. Kejelasan dan keterbukaan informasi, yaitu penyajian informasi yang mudah dipahami dan tidak menyesatkan. Ketepatan waktu pelaporan, yaitu penyampaian laporan keuangan secara tepat waktu. Pengungkapan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), yaitu tingkat rincian informasi tambahan yang disajikan.

Regulasi Pendukung Transparansi

Transparansi dalam laporan keuangan pemerintah didukung oleh berbagai regulasi di Indonesia, di antaranya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-undang ini mengatur hak masyarakat untuk memperoleh informasi dari badan publik. Pemerintah diwajibkan menyediakan informasi yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan, termasuk informasi terkait laporan keuangan. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan ini mengatur kewajiban instansi pemerintah dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan serta laporan kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Regulasi ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur (library research). Pendekatan ini dipilih karena penelitian dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian, seperti jurnal ilmiah, buku referensi, serta dokumen resmi. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami dan menganalisis fenomena secara mendalam, khususnya terkait transparansi dalam laporan

keuangan pemerintah pusat dan daerah. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai konsep, teori, serta praktik transparansi dalam pengelolaan keuangan publik. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur dan dokumen yang relevan dengan penelitian. Data tersebut meliputi jurnal ilmiah yang membahas transparansi dan akuntabilitas keuangan publik, buku serta refrensi lainnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

Uraian	Catatan	TA 2024 (Audited)			TA 2023 (Audited)
		Anggaran	Realisasi	% Realisasi terhadap Anggaran	
A. Pendapatan Negara dan Hibah	B.2.1				
I. Pendapatan Perpajakan	B.2.1.1	2.218.401.100.000.000	2.231.839.822.879.833	100,61%	2.154.208.219.467.830
1. Pajak Dalam Negeri	B.2.1.1.1	2.146.466.840.000.000	2.157.982.145.917.601	100,54%	2.089.718.285.003.417
2. Pajak Perdagangan Internasional	B.2.1.1.2	71.934.260.000.000	73.857.676.962.232	102,67%	64.489.934.464.413
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.2.1.2	549.137.450.331.000	584.378.057.583.276	106,42%	612.537.298.582.643
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	B.2.1.2.1	235.522.497.376.000	228.928.767.532.781	97,20%	254.203.031.073.614
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND)	B.2.1.2.2	85.845.465.000.000	86.384.593.538.563	100,63%	82.058.743.373.870
3. Pendapatan Badan Layanan Umum	B.2.1.2.3	80.430.963.536.000	104.716.732.371.421	130,19%	95.860.392.158.963
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	B.2.1.2.4	147.338.524.419.000	164.347.964.140.511	111,54%	180.415.131.976.196
III. Pendapatan Hibah	B.2.1.3	34.923.600.000.000	34.387.363.715.756	98,46%	17.184.158.879.725
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)		2.802.462.150.331.000	2.850.605.244.178.865	101,72%	2.783.929.676.930.198
B. Belanja Negara	B.2.2				
I. Belanja Pemerintah Pusat	B.2.2.1	2.485.902.580.516.000	2.496.223.901.585.884	100,42%	2.239.786.701.499.164
1. Belanja Pegawai	B.2.2.1.1	484.430.934.181.000	464.859.258.914.201	95,96%	412.711.324.466.564
2. Belanja Barang	B.2.2.1.2	406.983.772.758.000	523.368.042.639.998	128,60%	432.714.969.865.127
3. Belanja Modal	B.2.2.1.3	247.474.230.827.000	355.511.133.723.811	143,66%	303.041.293.068.751
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	B.2.2.1.4	497.319.602.591.000	488.426.422.143.817	98,21%	439.882.584.341.259
5. Belanja Subsidi	B.2.2.1.5	285.971.979.124.000	292.692.594.096.846	102,35%	269.592.086.053.747
6. Belanja Hibah	B.2.2.1.6	6.579.656.000	278.430.938.953	4231,69%	219.140.718.777
7. Belanja Bantuan Sosial	B.2.2.1.7	157.302.981.407.000	154.949.830.442.829	98,50%	156.601.633.832.214
8. Belanja Lain-lain	B.2.2.1.8	406.412.499.972.000	216.138.188.685.429	53,18%	225.023.669.152.725
II. Transfer ke Daerah	B.2.2.2	857.591.741.378.000	863.542.806.482.364	100,69%	881.430.544.208.454
1. Dana Bagi Hasil	B.2.2.2.1	143.099.927.456.000	153.174.562.784.262	107,04%	205.666.564.020.630
2. Dana Alokasi Umum	B.2.2.2.2	427.699.303.543.000	429.210.611.278.998	100,35%	398.029.628.594.542
3. Dana Alokasi Khusus	B.2.2.2.3	188.101.019.444.000	183.538.473.113.006	97,57%	181.357.561.783.241
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	B.2.2.2.3.1	53.822.463.835.000	50.890.077.113.845	94,55%	50.334.741.347.305
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	B.2.2.2.3.2	133.764.611.642.000	130.441.233.738.467	97,52%	128.081.946.376.309

Uraian	Catatan	TA 2024 (Audited)			TA 2023 (Audited)
		Anggaran	Realisasi	% Realisasi terhadap Anggaran	Realisasi
c. Hibah kepada Daerah	B.2.2.2.3.3	513.943.967.000	2.207.162.260.694	429,46%	2.940.874.059.627
4. Dana Otonomi Khusus	B.2.2.2.4	18.271.490.935.000	18.271.490.935.000	100,00%	17.241.263.570.000
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	B.2.2.2.5	1.420.000.000.000	1.420.000.000.000	100,00%	1.372.725.809.224
6. Dana Desa	B.2.2.2.6	71.000.000.000.000	70.925.927.774.598	99,90%	69.856.768.617.317
7. Insentif Fiskal	B.2.2.2.7	8.000.000.000.000	7.001.740.596.500	87,52%	7.906.031.813.500
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)		3.343.494.321.894.000	3.359.766.708.068.248	100,49%	3.121.217.245.707.618
C. Surplus (Defisit) Anggaran (A - B)	B.2.3	(541.032.171.563.000)	(509.161.463.889.383)	94,11%	(337.287.568.777.420)
D. Pembiayaan	B.2.4				
I. Pembiayaan Dalam Negeri (Neto)	B.2.4.1	528.758.369.161.000	462.577.425.084.416	87,48%	275.463.701.706.796
1. Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri-Perbankan	B.2.4.1.1	151.381.000.000.000	56.419.615.865.000	37,27%	37.225.200.000.000
2. Pemberian Pinjaman	B.2.4.1.2	(4.171.912.452.000)	(4.242.437.773.274)	101,69%	(1.905.999.112.657)
3. Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman	B.2.4.1.3	3.921.260.000.000	4.023.538.398.833	102,61%	6.374.398.495.969
4. Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi	B.2.4.1.4	649.230.000.000	1.400.109.062.740	215,66%	1.097.737.606.166
5. Surat Berharga Negara (Neto)	B.2.4.1.5	554.655.048.027.000	450.733.252.420.187	81,26%	308.193.788.405.962
a. Penerimaan Surat Berharga Negara		-	1.075.437.376.773.300	-	848.108.055.742.428
b. Pengeluaran Surat Berharga Negara		-	624.704.124.353.113	-	539.914.267.336.466
6. Pinjaman Dalam Negeri (Neto)	B.2.4.1.6	(636.230.414.000)	15.019.471.247.141	-2360,70%	14.558.368.405.525
a. Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri		3.258.429.586.000	20.122.653.359.752	617,56%	17.504.129.527.679
b. Pengeluaran Pembiayaan-Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri		3.894.660.000.000	5.103.182.112.611	131,03%	2.945.761.122.154
7. Penyertaan Modal Negara/Dana Investasi Pemerintah	B.2.4.1.7	(151.216.040.000.000)	(44.332.592.681.665)	29,32%	(69.897.795.440.654)
8. Kewajiban Penjaminan	B.2.4.1.8	(823.986.000.000)	(1.458.986.000.000)	177,06%	(330.511.505.000)

Uraian	Catatan	TA 2024 (Audited)			TA 2023 (Audited)
		Anggaran	Realisasi	% Realisasi terhadap Anggaran	Realisasi
9. Dana Pengembangan Pendidikan Nasional	B.2.4.1.9	(25.000.000.000.000)	(15.000.000.000.000)	60,00%	(20.000.000.000.000)
10. Pembiayaan Lain-lain	B.2.4.1.10		15.454.545.454		148.514.851.485
II. Pembiayaan Luar Negeri (Neto)	B.2.4.2	12.273.802.402.000	92.311.154.268.612	752,10%	81.200.046.007.725
1. Penarikan Pinjaman Luar Negeri	B.2.4.2.1	97.751.162.402.000	179.765.350.519.789	183,90%	162.650.352.798.218
a. Penarikan Pinjaman Tunai	B.2.4.2.1.1	60.000.000.000.000	60.028.929.576.507	100,05%	82.990.780.840.684
b. Penarikan Pinjaman Kegiatan	B.2.4.2.1.2	37.751.162.402.000	119.736.420.943.282	317,17%	79.659.571.957.534
2. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri	B.2.4.2.2	(85.477.360.000.000)	(87.454.196.251.177)	102,31%	(81.450.306.790.493)
Jumlah Pembiayaan (D.I + D.II)		541.032.171.563.000	554.888.579.353.028	102,56%	356.663.747.714.521
E. Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran-SILPA (SIKPA) (D + C)	B.2.5		45.727.115.463.645		19.376.178.937.101

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah

N O	Jenis kegiatan	Volume	Lokasi	Jumlah Dana (Rp)	Sumber dana	Keterangan
1.	Penyelenggara Pemerintahan Desa			965.494.910	ADD/PBH/ DLL	
	1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	1 org	Medan Estate	46.800.000	ADD	SUDAH TERMASUK PPN & PPH
	2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	17 org	Medan Estate	413.178.632	ADD	
	3. Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan Kader Posyandu/Balita	Paket	Medan Estate	44.691.719	ADD	
	4. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	Paket	Medan Estate	119.899.652	ADD/PBH/ DLL	
	5. Tunjangan BPD	Paket	Medan	61.700.000	PBH	
	6. Operasional BPD	Paket	Medan	14.931.811	PBH	
	7. Alat Tulis Kantor (ATK)	Paket	Estate	2.500.000	DLL	
	8. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran	Paket	E	254.965.096	PBH	
	9. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Paket	Medan Estate s	3.128.000	PBH	
	10. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Paket	Medan Estate	0	DLL	
	11. Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (SDGs Desa)	Paket	Medan Estate	0	ADD	
	12. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (Honor Penyusun RKP Desa)	Paket	Medan Estate	3.700.000	PBH	

	13. Pengembangan Sistem Informasi Desa Pendaftaran Indeks Desa Membangun	Paket	Estate Medan	0	PBH PBH	
	14. Operasional Tim Penjaringan dan Penyaringan	Paket	Estate			
	15. Penentuan/Penegasan Tapal Batas Desa	Paket	Medan Estate	0	DLL	
		Paket	Medan Estate	0		
2	Pembangunan			1.710.893.816	DDS/PBH /DLL	
	1. Beasiswa Pendidikan	Paket	Medan	0	PBH	SUDAH TERMASUK PPN & PPH
	2. Penyelenggaraan Posyandu	Paket	Estate	427.441.593	DDS/DLL	
	3. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	Paket	Medan Estate	0	DLL	
	4. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Paving Blok)	Paket	Medan Estate	590.886.000	DLL	
	5. Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa	Paket	Medan Estate	0	DLL	
	6. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa (Gapura Dusun)	Paket	Medan Estate	359.420.000	DLL	
	7. Media Komunikasi Desa				PBH	
	8. Pemeliharaan Sanitasi Permukiman	Paket	Medan Estate	0	DLL	
	9. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman	Paket	Medan	0	DLL	
	10. Pengelolaan Lingkungan		Estate		PBH	
	dan BPD				PBH	
	2. Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan (Pelatihan-pelatihan)	Paket	Medan Estate	28.483.300		
5.	Penanggulangan-Bencana, Darurat dan Mendesak			183.600.000	DSS	
	1. Bantuan Langsung Tunai (BLT)	Paket	Medan Estate	183.600.000	DSS	

Berdasarkan hasil kajian literatur yang telah dilakukan terhadap berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, buku referensi, serta regulasi terkait, diperoleh gambaran bahwa transparansi dalam laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah merupakan elemen penting dalam mewujudkan akuntabilitas publik. Transparansi tidak hanya dipahami sebagai keterbukaan informasi, tetapi juga mencakup kualitas penyajian informasi yang dapat diakses, dipahami, dan dimanfaatkan oleh masyarakat.

1. Tingkat Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, pemerintah pusat dan daerah di Indonesia telah memiliki landasan hukum yang kuat dalam mewujudkan transparansi, seperti Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik serta peraturan terkait pelaporan keuangan pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa secara regulasi, transparansi telah menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap entitas pemerintah. Namun, dalam implementasinya, tingkat transparansi masih bervariasi. Pada beberapa instansi pemerintah, laporan keuangan telah disajikan secara terbuka melalui media digital seperti website resmi. Akan tetapi, tidak

semua pemerintah daerah memiliki sistem informasi yang memadai, sehingga akses masyarakat terhadap laporan keuangan masih terbatas.

2. **Aksesibilitas Informasi Keuangan.** Dari hasil kajian, ditemukan bahwa akses terhadap laporan keuangan pemerintah masih belum sepenuhnya merata. Meskipun beberapa pemerintah daerah telah menyediakan laporan keuangan secara online, masih terdapat kendala seperti: Website yang sulit diakses atau tidak diperbarui secara berkala, Informasi yang tidak disajikan secara lengkap, Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait ketersediaan informasi, Kondisi ini menunjukkan bahwa transparansi belum sepenuhnya efektif, karena informasi yang seharusnya terbuka masih sulit dijangkau oleh publik.
3. **Kelengkapan dan Kualitas Penyajian Laporan Keuangan.** Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa dari sisi kelengkapan, laporan keuangan pemerintah pada umumnya telah mengikuti standar yang berlaku, seperti penyajian Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Namun demikian, kualitas pengungkapan dalam CaLK masih menjadi permasalahan utama. Banyak laporan keuangan yang belum memberikan penjelasan rinci terkait pos-pos tertentu, sehingga menyulitkan pengguna laporan dalam memahami kondisi keuangan secara menyeluruh. Selain itu, masih ditemukan penyajian informasi yang bersifat formalitas, tanpa disertai penjelasan yang mendalam. Hal ini menyebabkan transparansi menjadi kurang optimal, karena informasi yang disajikan belum sepenuhnya informatif.
4. **Kejelasan dan Keterpahaman Informasi.** Dari aspek kejelasan, laporan keuangan pemerintah masih cenderung menggunakan istilah teknis akuntansi yang sulit dipahami oleh masyarakat umum. Hal ini menjadi salah satu hambatan dalam mewujudkan transparansi yang sesungguhnya. Transparansi yang efektif seharusnya tidak hanya berfokus pada penyediaan informasi, tetapi juga memastikan bahwa informasi tersebut dapat dipahami oleh berbagai kalangan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penyederhanaan bahasa serta penyajian informasi yang lebih komunikatif.
5. **Ketepatan Waktu Pelaporan.** Ketepatan waktu merupakan salah satu indikator penting dalam transparansi. Berdasarkan hasil kajian, masih terdapat keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan, terutama di tingkat pemerintah daerah. Keterlambatan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya koordinasi antar unit kerja, serta sistem pelaporan yang belum optimal. Dampaknya, informasi yang disampaikan menjadi kurang relevan dan mengurangi kepercayaan publik.
6. **Faktor Penghambat Transparansi.** Beberapa faktor utama yang menghambat transparansi laporan keuangan pemerintah antara lain, Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten di bidang akuntansi pemerintahan, Sistem informasi keuangan yang belum terintegrasi secara optimal, Kurangnya komitmen terhadap prinsip transparansi, Minimnya pengawasan dan evaluasi terhadap pelaporan keuangan. Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa permasalahan transparansi tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berkaitan dengan aspek manajerial dan budaya organisasi.
7. **Keterkaitan Transparansi dengan Good Governance.** Transparansi memiliki hubungan yang sangat erat dengan konsep good governance. Berdasarkan hasil penelitian, transparansi yang baik akan mendorong meningkatnya akuntabilitas, partisipasi masyarakat, serta kepercayaan publik terhadap pemerintah. Sebaliknya, rendahnya transparansi dapat memicu terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan serta menurunkan kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, transparansi harus menjadi prioritas utama dalam reformasi pengelolaan keuangan publik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, transparansi laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah merupakan elemen penting dalam mewujudkan akuntabilitas publik dan good governance. Secara regulasi, transparansi telah didukung oleh berbagai peraturan yang kuat, namun dalam praktiknya masih belum optimal. Hal ini terlihat dari masih adanya kendala seperti keterbatasan akses informasi, kualitas penyajian laporan keuangan yang belum sepenuhnya informatif, penggunaan istilah teknis yang sulit dipahami masyarakat, serta keterlambatan dalam pelaporan. Selain itu, faktor keterbatasan sumber daya manusia, sistem informasi yang belum terintegrasi, serta kurangnya komitmen terhadap prinsip transparansi juga menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan melalui peningkatan kualitas penyajian laporan keuangan, penyederhanaan informasi, serta penguatan sistem dan pengawasan agar transparansi dapat terwujud secara optimal dan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). *Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)*.
- Halim, A. (2012). Akuntansi sektor publik: *Akuntansi keuangan daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: Andi.
- Nordiyawan, D., & Hertianti, A. (2010). *Akuntansi sektor publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Pemerintah Kota Medan. (2025). *Informasi Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang *Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah*. Jurnal *Akuntansi & Auditing* Volume 8/No. 2/Mei 2012"
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang *Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah*.
- Syahrifa. (2009). *Permasalahan akuntansi pada pemerintahan daerah*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang *Perbendaharaan Negara*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang *Keterbukaan Informasi Publik*.
- Yurika Aulia, dkk. (2024). *Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Deli Serdang*. Journal of Student Research (JSR), Vol. 2 No. 2,